

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan IV 2022, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,81% (mtm), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 1,64% (mtm). Inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pada kelompok makanan antara lain tomat, ikan kembung, cabai rawit, kangkung, dan ikan tongkol. Di sisi lain, tarif angkutan udara mengalami penurunan seiring dengan beberapa maskapai yang membuka jadwal penerbangan baru di NTT, sehingga menahan laju inflasi. Secara tahunan, inflasi *year-on-year* pada Triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,65% (yoy), melandai dibandingkan Triwulan sebelumnya sebesar 6,97% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 5,51% (yoy).

Sebagai Kota Non IHK, Kabupaten Alor mengikuti inflasi Kota IHK terdekat, yaitu Kabupaten Sikka. Pada Triwulan IV 2022, Kabupaten Sikka mengalami inflasi sebesar 1,08% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,57% (mtm). Inflasi Kabupaten Sikka terutama bersumber dari meningkatnya harga tomat, ikan tuna, ikan layang, beras, dan rokok kretek filter.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan. Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah Timor yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
2. Kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau *assymmetric information* antarpelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.
3. Distorsi struktur pasar. Distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga.
4. Produktivitas pangan. Kondisi iklim dan cuaca yang cenderung panas hampir di seluruh daerah di Provinsi NTT menjadikan lahan di Provinsi NTT bersifat kering dan tandus, sehingga sangat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Nagekeo, pada tanggal 7 Desember 2022.
2. Pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Balinusra di Provinsi Bali, pada tanggal 9 Desember 2022.
3. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Wilayah Timor, Rote, dan Sabu di Kota Kupang, pada tanggal 15 Desember 2022.
4. Operasi pasar dan pasar murah TPID Kota Kupang sepanjang bulan Desember 2022.
5. Operasi pasar dan pasar murah TPID kabupaten/kota se-Provinsi NTT, sepanjang bulan Desember 2022.

Panen bersama komoditas hortikultura di Kampung Sadar Inflasi Kota Kupang, pada tanggal 15 Desember 2022.

7. Rapat teknis dan rapat koordinasi TPID kabupaten/kota di Provinsi NTT jelang HBKN Natal dan Tahun Baru, sepanjang bulan Desember 2022.
8. Pelaksanaan program subsidi angkut komoditas hortikultura Kota Kupang, 29 - 31 Desember 2022.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah dituliskan dalam peta jalan pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi NTT secara rutin setiap bulannya melaksanakan kegiatan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi TPID, serta melaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Provinsi NTT setiap triwulannya serta melaksanakan tindak lanjut atas rapat HLM TPID yang telah dilakukan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Optimalisasi TTIC sebagai pusat distribusi bahan pangan pokok yang didukung dengan.
 2. Melaksanakan Program pengendalian inflasi berbasis masyarakat.
 3. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat.
 4. Pembentukan database surplus / defisit komoditas pangan strategis (Cabe dan Bawang Merah).
 5. Melakukan pengumpulan Data Pengolahan Informasi Pasar (PIP) Komoditi Peternakan
 6. Pelatihan warga dibidang teknologi, pertanian organik, dan usaha tani.
 7. Pendampingan bagi kelompok tani dibidang penerapan pertanian organik berbasis teknologi dan manajerial kelembagaan.
 8. Program lahan percontohan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dibimbing langsung oleh petugas penyuluh lapang (PPL) berbasis teknologi dan pertanian organik.
 9. Pengembangan unit pengolahan pupuk dan pestisida organik.
 10. pengembangan unit pengolahan pasca panen padi organik sehingga dapat meningkatkan nilai jual ke wilayah lain.
 11. pengembangan koperasi unit desa (KUD).
 12. kebijakan penerapan pertanian organik kepada masyarakat dan keikutsertaan menjadi anggota koperasi unit desa (KUD).
 13. menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk meningkatkan kesempatan menembus pasar ke wilayah lain.
 14. Melaksanakan pemantauan harga komoditas bahan pokok
 15. melaksanakan program sidak pasar dan pasar murah
 16. Melaksanakan optimalisasi kegiatan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH).
 17. Mengakselerasi pemulihan sektor pertanian dan peternakan dengan membentuk klaster komoditas yang sering mendorong inflasi seperti klaster bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
 18. Pengadaan kapal penangkap ikan kapasitas besar dan alat bantu penangkapan ikan/pukat dan penguatan kelembagaan dan ketrampilan nelayan dalam rangka
- 6.

menekan biaya produksi ikan.

19. Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan, jembatan, pelabuhan) antar kabupaten/ kota.
20. Pemanfaatan tol laut.
21. Melaksanakan Program pengendalian inflasi berbasis masyarakat;
22. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat